

Soal Penanganan Kemiskinan dan Stunting di Sekadau, Sutarmidji: Validasi Data

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, menilai pertumbuhan Kabupaten Sekadau akan lebih cepat. Sebab, angka kemiskinan di bawah provinsi dan pengangguran terbuka juga rendah. "Pertumbuhan (ekonomi) bagus. Gini rasionya tidak begitu tinggi sehingga untuk penanganan-penanganan kemiskinan, stunting tinggal validasi data saja," kata Sutarmidji kepada awak media usai menghadiri Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sekadau tahun 2024, Rabu, 15 Maret 2023. Menurut Sutarmidji, jika validasi data dilakukan, maka capaian pasti akan naik. Selain itu, ia menilai Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Sekadau sudah bagus. "Sekarang desa sangat tertinggal dan desa tertinggal tidak ada. Saya lihat nilai-nilai desa maju dikit lagi bisa jadi desa mandiri," ucapnya. "Kalau satu daerah desanya berstatus desa mandiri dan maju, maka dia mau melakukan apa pun lebih gampang. Hal-hal yang kecil itu tidak perlu jadi perhatian utama karena dengan sendirinya pasti akan berubah," sambungnya. Ia menjelaskan, ada 50 indikator dalam IDM. Jika suatu desa sudah memenuhi 50 indikator tersebut, maka desa tersebut akan berkembang dan tinggal ditopang oleh BUMDes. "Kalau BUMDes bagus, maka ekonomi desa berkembang. Misalnya di sini (potensi) karet. Kalau ada BUMDes alur penjualannya itu pendek karena dari penoreh, dijual ke BUMDes lalu pabrik. Kalau tidak ada BUMDes maka dijual ke pengepul dan harganya itu rendah," ucapnya. Sutarmidji mengatakan, BUMDes tidak perlu repot lagi cari modal. Sebab, ada dana desa yang boleh digunakan untuk penyertaan modal BUMDes maksimal 30 persen. "Atau gunakan KUR. Bunganya 6 persen jak. Itu sangat menjanjikan," ujarnya. Sementara itu, Bupati Sekadau, Aron, mengatakan salah satu rencana kerja pemerintah daerah terkait dengan Musrenbang tingkat kabupaten, yakni pertama menyepakati permasalahan dan prioritas pembangunan di tahun 2024. "Kedua, menyepakati program kegiatan pagu indikatif, indikator, dan target kinerja serta notasi. Ketiga, menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran prioritas pembangunan provinsi," paparnya. Keempat, yaitu klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan kabupaten dengan program

kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan rapat hasil Musrenbang tingkat kecamatan yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. "Mari kita mencermati beberapa isu strategis dan permasalahan yang menjadi kendala serta tantangan bagi Kabupaten Sekadau dalam mengambil langkah kebijakan yang strategis," pungkasnya.